

**Strategi Penertiban Administrasi Dalam Pengelolaan Inventaris
(Studi Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik



Disusun Oleh :

MARIA RISKA PAJI VALEN SARY

2019210177

**Konsentrasi Manajemen Publik
Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Tribhuwana Tungadewi
Malang
2023**

STRATEGI PENERTIBAN ADMINISTRASI DALAM PENGELOLAAN INVENTARIS

Maria Riska Paji Valen Sary, Willy Tri Hardianto, Asih Widi Lestari

**Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tribhuwana
Tunggadewi Malang**

Email : Riskasary99@gmail.com

RINGKASAN

Struktur dewan yang kuat yang kompeten, tidak rumit, dan akuntabel merupakan komponen kunci dari administrasi yang hebat. Administrasi properti lokal termasuk menyimpan catatan keuangan, menginventarisasi properti, dan mengajukan laporan sesuai dengan undang-undang. Untuk mengendalikan pengelolaan barang milik provinsi, unit kerja di sektor barang konsumsi harus mengawasi sumber daya. Investigasi ini akan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat agar lebih mudah memahami bagaimana teknik kontrol regulasi bekerja dalam administrasi stok. Pengujian purposive digunakan dalam proses pemilihan saksi, dengan wilayah organisasi keuangan dan wilayah organisasi secara keseluruhan sebagai dua sumber. teknik triangulasi meliputi observasi, wawancara, dan pendokumentasian untuk menilai kredibilitas data. Analisis informasi memanfaatkan model Miles dan Huberman, khususnya pengurangan informasi, tampilan informasi, dan akhiri/periksa. Menurut penelitian tentang strategi pengendalian biaya, kerjasama yang saling tergantung berdasarkan prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota diperlukan untuk mencapai pengelolaan biaya dalam pengelolaan persediaan. Faktor pendukungnya adalah kerjasama dan sumber daya manusia, setiap orang memiliki tujuan yang sama dan berkontribusi dalam mencapai tujuan. Faktor penghambat strategi penertiban administrasi dalam pengelolaan inventaris adalah hilangnya barang yang tidak diketahui dan juga masih terjadi keterlambatan surat tanggung jawab dari bendahara pengeluaran ke bendahara barang.

Kata Kunci : Strategi, Tertib Administrasi, Pengelolaan Inventaris

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Barang Milik Daerah (BMD) adalah segala sesuatu yang diperoleh dari sumber luar atau dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Prosedur penatausahaan BMD meliputi pembukuan, pemeliharaan inventarisasi, dan pelaporan data BMD sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Unit kerja yang menangani produk konsumen harus mengelola aset agar BMD dapat ditangani secara terorganisir. Untuk mengetahui jumlah, nilai, dan kondisi riil BMD yang dimiliki oleh pengguna produk atau pemilik barang selama jangka waktu tertentu, dimintakan informasi mengenai data administrasi dan fisik BMD. Informasi ini diverifikasi berdasarkan inventarisasi (Eka, 2021).

Pasal 1 angka 31 Permendagri 17 Tahun 2007 mendefinisikan inventarisasi sebagai proses pengumpulan informasi tentang barang milik daerah, mencatat hasilnya, dan melaporkannya. Husnah (2017) mengatakan bahwa melacak semua penggunaan barang tetap dan bergerak oleh karyawan iklan dan fungsi sebagai cara untuk membuat keputusan tentang manajemen barang seperti membeli, mendistribusikan, atau membuang barang menunjukkan betapa pentingnya melakukan inventarisasi.

Salah satu tanda tata kelola yang baik adalah terciptanya sistem pengelolaan kekayaan daerah yang kompeten, bertanggung jawab, dan transparan. Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan, memperoleh manfaat dari iuran pendapatan daerah, dan berlangsung secara teratur, maka pengelolaan barang milik

daerah harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Salah satu aspek pengelolaan pemerintahan yang saat ini memerlukan perhatian khusus dari negara tetangga adalah pengelolaan kekayaan provinsi. Dalam mengawasi sumber daya teritorial secara tepat, otoritas publik juga harus menggunakan kecakapan dan kecukupan. Sesuai dengan asas otonomi daerah, pemerintah daerah berwenang mengawasi kekayaan dan keuangan daerah, prinsip ini diikuti oleh manajemen (Fitria, 2021).

Karena sumber daya dewan merupakan salah satu faktor yang menentukan seberapa baik suatu organisasi menghadirkan dirinya, semua tugas administratif ini menuntut gaya manajemen terbaik. Sumber daya harus dikelola dengan tepat untuk memberi manfaat bagi orang dan organisasi, seperti yang ditunjukkan oleh kemampuan mereka untuk mempertimbangkan hukum informal yang relevan. Kegiatan seperti melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan barang milik daerah sesuai dengan tanggung jawab disebut pendayagunaan. Pedoman Penjaminan Rumah Tangga 1 Perda 19 Tahun 2016 juga menyebutkan syarat ini. Salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh kelompok profesional adalah menemukan metode untuk mengurangi biaya yang terkait dengan pengelolaan aset bersama. karena pentingnya aset dan barang teritorial dalam pemerintahan (Adhitama, Diana, 2019).

Menurut Ibu Sutriyah di bidang organisasi umum, anomali-anomali sering terjadi di Organisasi Moneter dan Sumber Daya Kota Malang, antara lain adanya pengaburan kerugian produk dan barang yang tidak terungkap secara lengkap.

Penatausahaan inventarisasi barang milik daerah yang kurang tepat mengakibatkan tata kelola pemerintahan yang tidak tertata, oleh karena itu peneliti

tertarik untuk melakukan kajian dengan judul “**Strategi Penertiban Administrasi Dalam Pengelolaan Inventaris di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut adalah garis besar permasalahan yang dapat diturunkan dari konteks kesejarahannya:

1. Bagaimana Strategi Penertiban Administrasi Pengelolaan Inventaris pada Badan Keuangan dan Aset Daerah ?
2. Dukungan dan hambatan apa yang ada untuk strategi kontrol administrasi aset dan lembaga keuangan daerah untuk manajemen inventaris?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk memutuskan bagaimana menangani administrasi inventaris di organisasi keuangan dan aset local.
2. Untuk memahami kekuatan pendorong di balik solusi kontrol administratif untuk manajemen inventaris di organisasi keuangan dan aset lokal.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut adalah keuntungan dari penyelidikan ini mengingat rencana masalah dan tujuan pemeriksaan di atas:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca, peneliti, dan pihak lain untuk mengetahui lebih banyak informasi.
2. Secara Praktis

- a. Peneliti dapat memperoleh pengalaman, pemahaman, dan keterampilan intelektual dari penelitian ini yang secara signifikan memajukan teori dan praktik.
- b. Investigasi ini diharapkan dapat digunakan oleh lembaga negara daerah untuk membantu mereka mengelola inventarisasi properti teritorial.
- c. Bagi Pembaca Dapat Menambah Bahan Bacaan dan Referensi Mengenai Strategi Pengendalian Administrasi Dalam Pengelolaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Bagi Peneliti Selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitama, Muhammad Okto, Diana. 2019. *Strategi Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi*. Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol 8 No.2
- Adnan, Hasyim. 2018. Fungsi Inventaris Barang Milik Daerah dalam Rangka Tertib Administrasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Padeklang. *Jurnal KA Pemda (online)*, Vol.12, No.7 ,diakses 25 November 2022
- Artikel DJKN. 2021. Inventarisasi BMN sebagai Upaya Tertib Administrasi dan Tertib Pengelolaan BMN. Diakses 07 Desember 2022
- Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Malang. 2023. Profil Pemkot Malang (online), diakses 26 Maret 2023 dari <https://bkad.malangkota.go.id>
- Buyung. 2021. Strategi Pelayanan Publik Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Skripsi tidak diterbitkan*. Malang: FISIP Unitri MALANG
- Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo.2023. Inventaris Barang Milik Daerah. Diakses 26 Maret 2023 dari <https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/938/inventarisasi-barang-milik-daerah-tahun-2023>
- Fitria, Nurul Jannah Lailatul, dkk. 2021. *Strategi Pengelolaan Aset Daerah Kota Probolinggo*. Universitas Panca Marga. *Jurnal Studi Sosial*. Vol.6 No.2 diakses pada 21 Oktober 2022
- Khusnah, Basariyatul. 2017. *Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik/ Kekayaan Negara di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo*. Skripsi diterbitkan (online), diakses 07 Desember 2022
- Maulana, Achmad. 2017. *Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. (online), diakses 16 November 2022 dari <http://repository.unmuhjember.ac.id/10348/9/JURNAL.pdf>
- Moleong, J.Lexy.2015. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Inventaris

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah

Sia, Vely. 2022. Pentingnya Mengelola Inventaris untuk Kelangsungan Bisnis. Mekari Jurnal. (online) diakses 26 Maret 2023 dari <https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-dan-pengelolaan-inventaris>

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Syahputra, Khoirul dkk. 2018. Strategi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Ambas. Institut Pertanian Bogor. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*. Vol.10 No.1 diakses pada 21 Oktober 2022

Wirna, 2022. *Implementasi Pengelolaan Inventaris dan Penggunaan Barang di Kantor Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Sulawesi Barat*. Skripsi diterbitkan (online), diakses 25 November 2022.

Yam, Jim. 2020. *Manajemen Strategi; Konsep & Implementasi*. Makasar: Nas Media Pustaka.